



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir di xxxxx, NIK. xxxxx, Umur xxxx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan terakhir xxxx, Tempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor handphone xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di xxxxxx, NIK xxxx, Umur xxxx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan terakhir xxx, Dahulu bertempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sekarang tidak diketahui alamatnya lagi di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut syari'at Islam pada tanggal 10 November 2009 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 18 Semptember 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur selama 4 (empat) tahun, dan terakhir tinggal di mess PT. xxxxxxxx, di Desa Melata, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, hingga pisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
 - a. **Anak I;**
 - b. **Anak II;**
 - c. **Anak III;**
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada anak dan Penggugat sejak bulan Oktober 2022;
 - b. Bahwa ketika Penggugat pulang dari bekerja, Tergugat tidak berada di rumah;
 - c. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan jelas
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022, Tergugat pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dari kediaman bersama;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan berturut-turut ;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
9. Bahwa selama pisah rumah yang menanggung kebutuhan Penggugat dan anak-anak adalah Penggugat sendiri dengan bekerja di xxxx;
10. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**xxxxxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan secara lisan pada posita angka 4, selengkapnyanya berbunyi

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat juga memotong KTP milik Penggugat dengan parang hingga putus;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir ke persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.1), dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal xxxx, yang dikeluarkan Kepala Desa xxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.3) dan diparaf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Protestan, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bulik Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten kotawaringin timur, kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir mereka tinggal di mess PT. xxxxx hingga berpisah;
- Bahwa umumnya saksi berkunjung ke mess kediaman Penggugat dan Tergugat saban bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 3 (tiga) orang anak, satu laki-laki dan dua orang perempuan;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun antara tahun 2022 atau 2023 sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Namun saksi mengetahui sekitar tahun 2022 atau 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa kabar beritanya;
- Bahwa kakak pertama saksi sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, namun hingga saat ini belum juga mendapatkan alamat pasti dari Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui secara pasti;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat pun juga tidak pernah memberikan kabar serta tidak pernah mengirimkan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan oktober tahun 2023, Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama xxxx dan saat ini Penggugat sedang hamil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat terkait keadaan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur xxxx, agama Protestan, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi menikah dengan Adik kandung Penggugat (saksi I) pada bulan September 2020;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saat saksi jadi adik ipar Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di mess PT. xxxxx hingga berpisah;
- Bahwa biasanya saksi berkunjung ke mess kediaman Penggugat dan Tergugat satu bulan satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Namun saksi mengetahui sejak awal tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, namun hingga saat ini belum juga berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui secara pasti;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat pun juga tidak pernah memberikan kabar serta tidak pernah mengirimkan nafkah terhadap Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Ngb



- Bahwa sejak beberapa bulan yang lalu, Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama xxxx dan saat ini Penggugat sedang hamil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat terkait keadaan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri ke sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir oleh karenanya perkara a quo harus diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat rukun

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan sekitar bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat juga memotong KTP milik Penggugat dengan parang hingga putus;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta Autentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat berdasarkan bukti P.1 tersebut diketahui bahwa nama lengkap Penggugat adalah **xxxxx** dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang merupakan akta Autentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 serta berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Nanga Bulik baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan tertanggal xxxx, yang dikeluarkan Kepala nama Kepala xxxxx. Bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan mengenai keberadaan Tergugat oleh karenanya masih memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis atau surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka oleh karenanya, Kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Ngb



2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi paling tidak sejak awal tahun 2023 karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal paling tidak sejak awal tahun 2023 hingga saat ini dan saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia atau Gaib;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah terhadap Penggugat;
6. Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan dalam keadaan hamil;
7. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Ngb



dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan masalah yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan masalah sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إصراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: *“Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra”;*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**xxxxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nanga Bulik, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/HK.05/09/2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Abu Mansur, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Abu Mansur, S.H.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)